

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pengasuhan anak dalam lembaga kesejahteraan sosial telah menjadi perhatian berbagai penelitian, khususnya terkait peran pengasuh, pola pengasuhan, serta bentuk pelayanan sosial yang diberikan kepada anak. Penelitian terdahulu penting untuk ditelaah guna memahami kecenderungan pendekatan metodologis yang digunakan, karakteristik subjek penelitian, serta hasil utama yang ditemukan, sehingga posisi penelitian ini dapat ditempatkan secara jelas dalam kajian implementasi pengasuhan disiplin positif di LKSA.

Penelitian pertama, penelitian Septriani et al. (2025) tentang peran pengasuh dalam pembinaan disiplin anak di Panti Asuhan Ar'Raudah Bengkulu Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Subjek penelitian terdiri dari 10 informan, yaitu 2 orang pengasuh, 2 orang tua yang tinggal di sekitar panti, serta 6 orang anak asuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pengasuh dalam membina disiplin anak mencakup enam indikator, yaitu sebagai pendidik, pembimbing, pembina, penasehat, motivator, dan teladan. Namun, dari keenam peran tersebut, hanya tiga peran yang terlaksana secara optimal, yaitu sebagai pembimbing, pembina, dan penasehat. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif pengasuh memiliki banyak peran, dalam praktiknya tidak semua

peran dapat dijalankan secara maksimal, yang mengindikasikan adanya keterbatasan dalam implementasi pembinaan disiplin anak di lembaga pengasuhan.

Penelitian kedua, penelitian Wahida et al. (2024) tentang pola pengasuhan anak di Yayasan Panti Asuhan Ummul Yatama Serambi Mekkah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, yang memungkinkan peneliti menggali praktik pengasuhan secara mendalam dalam konteks satu lembaga. Subjek penelitian meliputi pengasuh, anak asuh, dan staf yayasan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta analisis dokumen lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pengasuhan di yayasan tersebut didasarkan pada prinsip kasih sayang, disiplin, dan pendidikan agama. Pengasuh diposisikan sebagai pengganti orang tua yang memberikan perhatian kepada anak sekaligus menegakkan aturan yang berlaku. Disiplin diterapkan melalui aturan yang jelas dan konsisten, namun pendekatan yang digunakan lebih menekankan pada kepatuhan terhadap aturan dibandingkan pada proses dialogis dan reflektif dalam membangun kesadaran perilaku anak. Hal ini menunjukkan bahwa disiplin dalam lembaga masih lebih berorientasi pada keteraturan perilaku daripada pada pembelajaran perilaku jangka panjang sebagaimana ditekankan dalam konsep disiplin positif.

Penelitian ketiga, penelitian Risky & Suma (2025) tentang peran LKSA Siti Fatimah dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi

anak di Desa Nogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari pengurus LKSA, Ketua RT dan RW, serta anak asuh yang tinggal di dalam dan luar asrama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKSA berperan sebagai fasilitator, motivator, mediator, dan dinamisator dalam penyelenggaraan pelayanan sosial yang mencakup bidang pendidikan, sosial, keterampilan, kerohanian, dan kewirausahaan. Penelitian ini menekankan peran kelembagaan dalam pelayanan sosial anak, namun tidak mengulas secara spesifik praktik pengasuhan dan pendisiplinan dalam relasi sehari-hari antara pengasuh dan anak, sehingga dinamika pembinaan perilaku anak di dalam lembaga belum tergambarkan secara mendalam.

Dari ketiga penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai pengasuhan anak di lembaga lebih banyak menyoroti peran pengasuh dan fungsi lembaga dalam pelayanan sosial, dengan pendekatan kualitatif dan subjek yang melibatkan pengasuh, pengurus, serta anak asuh. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis implementasi disiplin positif sebagai pendekatan pengasuhan berbasis non-kekerasan dan pembelajaran perilaku jangka panjang masih relatif terbatas.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, dapat dibuat tabulasi untuk meringkas fokus, metode, subjek, serta hasil penelitian dengan penelitian yang peneliti lakukan.

Table 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Metode	Subjek	Hasil Penelitian
1.	Septriani M, Siregar R, Permata S (2025)	Peran Pengasuh dalam Membina Disiplin pada Anak di Panti Asuhan Ar' Raudah Bengkulu Selatan.	Kualitatif deskriptif; wawancara dan observasi	2 pengasuh, 2 orang tua sekitar panti, 6 anak asuh	Peran pengasuh mencakup pendidik, pembimbing, pembina, penasehat, motivator, dan teladan, namun yang terlaksana optimal hanya peran pembimbing, pembina, dan penasehat. Menunjukkan keterbatasan implementasi peran pengasuh dalam pembinaan disiplin.
2.	Wahida N, Paisal J, Ramli R (2024)	Pola Pengasuhan Anak di Yayasan Panti Asuhan Ummul Yatama Serambi Mekkah.	Kualitatif studi kasus; wawancara mendalam, observasi partisipatif, dokumentasi	Pengasuh, anak asuh, dan staf yayasan	Pola pengasuhan didasarkan pada kasih sayang, disiplin, dan pendidikan agama. Disiplin diterapkan melalui aturan yang konsisten, namun lebih berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan dibandingkan pada proses dialogis dan reflektif.
3,	Surya Alivia	Peran Lembaga	Kualitatif deskriptif;	Pengurus LKSA,	LKSA berperan sebagai

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Metode	Subjek	Hasil Penelitian
	Rizki & Nasobi Niki Suma (2025)	Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Siti Fatimah dalam Memberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial terhadap Anak di Desa Nogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan	wawancara, observasi, dokumentasi	Ketua RT/RW, anak asuh dalam dan luar asrama	fasilitator, motivator, mediator, dan dinamisator dalam pelayanan pendidikan, sosial, keterampilan, kerohanian, dan kewirausahaan, namun tidak membahas secara spesifik praktik pendisiplinan dalam relasi pengasuhan sehari-hari.

B. Konsep Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Implementasi dipahami sebagai proses menerjemahkan rencana, kebijakan, atau konsep ke dalam tindakan nyata yang berlangsung pada situasi sosial tertentu dan melibatkan berbagai aktor yang memiliki peran berbeda. Perspektif ini menempatkan implementasi bukan sebagai tahap teknis setelah perencanaan, melainkan sebagai arena utama tempat suatu konsep diuji melalui praktik sehari-hari. Proses tersebut sangat dipengaruhi oleh cara pelaksana memahami tujuan program, menafsirkan aturan, serta menyesuaikan tindakan dengan kondisi lapangan yang sering kali

berubah-ubah (Aini & Asror, 2022). Oleh karena itu, implementasi tidak pernah bersifat netral atau otomatis, melainkan selalu mengandung unsur interpretasi dan penyesuaian yang dipengaruhi oleh pengalaman, nilai, serta kapasitas individu yang terlibat.

Konteks pelayanan sosial anak menambah kompleksitas proses implementasi karena praktik pengasuhan berlangsung melalui relasi sosial yang intens antara pengasuh dan anak. Interaksi tersebut tidak hanya memuat aspek pengawasan perilaku, tetapi juga menyangkut pembentukan rasa aman, kelekatan emosional, serta proses belajar sosial anak. Aturan pengasuhan yang sama dapat menghasilkan pengalaman yang berbeda bagi anak apabila cara penerapannya berbeda antar pengasuh. Situasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak cukup diukur dari keberadaan standar operasional atau kebijakan tertulis, melainkan dari kualitas relasi pengasuhan yang terbangun serta konsistensi praktik yang dijalankan sehari-hari (Harmita & Aly, 2023). Perspektif ini menegaskan bahwa implementasi pengasuhan harus dipahami sebagai proses sosial yang hidup dan tidak terlepas dari dinamika hubungan antarindividu di dalam lembaga.

Respons anak terhadap aturan dan bimbingan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses implementasi. Anak bukan penerima pasif kebijakan pengasuhan, melainkan subjek yang memiliki pengalaman, emosi, serta strategi adaptasi terhadap

lingkungan. Perilaku anak dapat memengaruhi cara pengasuh menyesuaikan pendekatan pengasuhan, sehingga implementasi berkembang melalui proses timbal balik. Interaksi semacam ini menunjukkan bahwa implementasi pengasuhan bersifat dialogis dan situasional, bukan proses satu arah dari lembaga kepada anak. Pandangan tersebut menjadi penting ketika menilai praktik pendisiplinan, karena kepatuhan anak terhadap aturan tidak selalu mencerminkan pemahaman atau internalisasi nilai, melainkan bisa menjadi respons terhadap relasi kuasa atau situasi tertentu.

2. Tujuan dan Fungsi Implementasi

Tujuan utama implementasi pengasuhan terletak pada upaya memastikan bahwa prinsip perlindungan anak dan pembinaan karakter yang dirumuskan secara normatif dapat diwujudkan secara nyata dalam pengalaman keseharian anak di lembaga. Implementasi berfungsi sebagai jembatan antara tujuan kebijakan dengan praktik konkret yang membentuk perilaku, sikap, dan relasi sosial anak. Tanpa implementasi yang bermakna, prinsip pengasuhan berbasis hak anak berisiko berhenti sebagai komitmen administratif yang tidak sepenuhnya dirasakan oleh anak sebagai penerima layanan (Aulia Akbar & Taufik, 2022). Oleh sebab itu, kualitas implementasi menentukan sejauh mana lembaga mampu menciptakan lingkungan pengasuhan yang aman, suportif, dan mendukung perkembangan psikososial anak.

Fungsi implementasi juga berkaitan dengan pembentukan pola interaksi sosial di dalam lembaga. Cara pengasuh menegakkan aturan, memberikan konsekuensi, serta merespons pelanggaran akan membentuk persepsi anak terhadap keadilan, otoritas, dan kepercayaan. Pendekatan yang konsisten dan disertai penjelasan cenderung membantu anak memahami alasan di balik aturan dan mengembangkan tanggung jawab personal. Sebaliknya, pendekatan yang berubah-ubah atau menekankan kepatuhan tanpa dialog berpotensi menghasilkan perilaku patuh yang bersifat situasional dan bergantung pada pengawasan, bukan kesadaran internal anak (Estiningsih et al., 2023). Situasi ini menunjukkan bahwa implementasi tidak hanya berdampak pada keteraturan perilaku, tetapi juga pada kualitas perkembangan moral dan sosial anak.

Implementasi juga memiliki fungsi reflektif bagi lembaga, karena melalui praktik pengasuhan sehari-hari pengasuh dapat menilai efektivitas pendekatan yang digunakan. Perubahan perilaku anak, munculnya konflik, maupun keberhasilan anak menyesuaikan diri dengan aturan menjadi indikator penting bagi lembaga untuk mengevaluasi strategi pengasuhan. Proses refleksi semacam ini memungkinkan terjadinya perbaikan berkelanjutan, terutama apabila lembaga memiliki ruang diskusi dan evaluasi yang terbuka di antara pengasuh dan pengurus (Harmita & Aly, 2023). Dengan demikian, implementasi tidak hanya menjadi tahap akhir dari

perencanaan, tetapi juga sumber pembelajaran institusional dalam meningkatkan kualitas layanan pengasuhan.

3. Tahapan Implementasi

Kajian pelayanan sosial umumnya membagi implementasi ke dalam tiga tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kerangka ini membantu memahami alur dasar penyelenggaraan program, namun praktik di lembaga pengasuhan menunjukkan bahwa ketiga tahap tersebut sering kali saling tumpang tindih dan berlangsung secara berulang. Perubahan kondisi anak, dinamika relasi pengasuh, serta keterbatasan sumber daya dapat mendorong lembaga melakukan penyesuaian terhadap aturan dan pendekatan pengasuhan yang telah direncanakan sebelumnya (Sukmadinata, 2021). Situasi ini menandakan bahwa implementasi tidak selalu mengikuti alur rasional yang kaku, melainkan berkembang secara adaptif mengikuti realitas lapangan.

Tahap perencanaan berperan dalam menentukan arah pengasuhan melalui penyusunan aturan, kesepakatan, serta pendekatan yang akan diterapkan kepada anak. Kualitas perencanaan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pengasuh dilibatkan dan memahami tujuan dari aturan yang dibuat. Aturan yang disusun tanpa proses internalisasi di kalangan pengasuh berpotensi diterapkan secara berbeda-beda, sehingga konsistensi pengasuhan menjadi sulit terjaga. Kondisi ini dapat menimbulkan

kebingungan pada anak terkait batasan perilaku yang berlaku dan memperlemah efektivitas pembinaan perilaku (Aini & Asror, 2022).

Tahap pelaksanaan menjadi titik krusial karena nilai dan aturan pengasuhan diwujudkan melalui interaksi nyata antara pengasuh dan anak. Pelaksanaan pengasuhan sangat dipengaruhi oleh situasi harian, beban kerja pengasuh, serta kondisi emosional anak. Penyesuaian pendekatan sering kali diperlukan ketika anak menunjukkan resistensi, konflik, atau perilaku bermasalah, sehingga praktik pengasuhan dapat berbeda dari rencana awal. Keadaan ini menunjukkan bahwa implementasi bukan proses statis, melainkan praktik yang terus dinegosiasikan sesuai dengan konteks sosial yang dihadapi (Prasetyo et al., 2023).

Tahap evaluasi berfungsi sebagai sarana refleksi terhadap praktik yang telah dijalankan serta sebagai dasar untuk melakukan perbaikan. Evaluasi dapat berlangsung melalui mekanisme formal, seperti rapat pengasuh, maupun melalui refleksi informal dalam interaksi sehari-hari. Hasil evaluasi dapat memengaruhi perubahan aturan, cara pemberian konsekuensi, maupun pendekatan komunikasi antara pengasuh dan anak. Proses ini menegaskan bahwa implementasi bersifat berkembang seiring dengan pengalaman lembaga dalam mengelola dinamika pengasuhan (Harmita & Aly, 2023).

4. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Keberhasilan implementasi pengasuhan di LKSA dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia, khususnya pengasuh sebagai pelaksana utama pengasuhan sehari-hari. Pemahaman tentang perkembangan anak, keterampilan komunikasi, serta kemampuan mengelola perilaku bermasalah menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas interaksi pengasuhan. Pengasuh yang belum memperoleh pelatihan khusus cenderung mengandalkan pengalaman pribadi atau pola pengasuhan konvensional, sehingga pendekatan yang digunakan belum tentu sejalan dengan prinsip pengasuhan berbasis hak anak (Apriliza Hasibuan et al., 2024). Kondisi ini dapat membatasi kemampuan lembaga dalam menerapkan pendekatan pengasuhan yang lebih reflektif dan dialogis.

Karakteristik anak asuh juga menjadi faktor yang memengaruhi proses implementasi. Anak-anak yang berada di LKSA umumnya memiliki latar belakang pengalaman yang kompleks, termasuk kehilangan orang tua, kemiskinan, atau pengalaman traumatis. Pengalaman tersebut dapat memengaruhi regulasi emosi, kemampuan mempercayai orang dewasa, serta respons terhadap aturan. Anak dengan kerentanan psikososial tertentu dapat menunjukkan perilaku yang menantang, sehingga membutuhkan pendekatan pengasuhan yang lebih sensitif dan konsisten. Implementasi pengasuhan yang tidak mempertimbangkan

kondisi ini berpotensi memicu konflik dan memperlemah efektivitas pembinaan perilaku (Nafira & Djuwita, 2025).

Sistem dan budaya lembaga turut menentukan konsistensi implementasi pengasuhan. Pola komunikasi internal, dukungan dari pengurus, serta mekanisme evaluasi berpengaruh terhadap cara pengasuh menjalankan perannya. Lembaga yang menyediakan ruang diskusi dan refleksi cenderung lebih adaptif dalam menyesuaikan pendekatan pengasuhan dengan kebutuhan anak. Sebaliknya, struktur organisasi yang kaku dan minim supervisi dapat menyebabkan praktik pengasuhan berjalan berdasarkan kebiasaan individual tanpa standar reflektif yang jelas (Aulia Akbar & Taufik, 2022). Situasi ini menunjukkan bahwa implementasi pengasuhan tidak hanya ditentukan oleh individu pengasuh, tetapi juga oleh iklim organisasi yang membingkai praktik keseharian mereka.

C. Konsep Pengasuhan Alternatif Keberlanjutan

1. Pengertian Pengasuhan Alternatif Keberlanjutan

Pengasuhan alternatif merupakan bentuk pengasuhan yang diberikan kepada anak oleh pihak selain orang tua kandung ketika keluarga inti tidak mampu menjalankan fungsi pengasuhan secara layak dan aman. Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) menegaskan bahwa pengasuhan alternatif diselenggarakan untuk menjamin terpenuhinya hak anak atas perlindungan, pengasuhan,

dan perkembangan yang optimal, serta harus selalu didasarkan pada kepentingan terbaik anak (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2011). Kerangka ini menempatkan pengasuhan alternatif sebagai bentuk perlindungan sementara, bukan sebagai pengganti permanen peran keluarga, sehingga setiap keputusan pengasuhan harus diarahkan pada upaya keberlanjutan pengasuhan yang lebih stabil bagi anak.

Konsep keberlanjutan dalam pengasuhan alternatif dikenal sebagai *continuum of care*, yaitu pendekatan yang memandang pengasuhan anak sebagai rangkaian proses yang saling terhubung dari waktu ke waktu. Pendekatan ini menekankan bahwa kebutuhan anak tidak berhenti pada satu tahap pengasuhan, melainkan berkembang seiring pertambahan usia dan perubahan situasi sosial. Oleh sebab itu, pengasuhan anak perlu disertai perencanaan yang memperhatikan transisi antar bentuk pengasuhan, termasuk kemungkinan reunifikasi dengan keluarga atau pengalihan ke bentuk pengasuhan berbasis keluarga yang lebih permanen Kusumanita & Rachmawati (2023). Perspektif ini menempatkan keberlanjutan pengasuhan sebagai aspek penting dalam mencegah ketidakpastian masa depan anak akibat penempatan yang terlalu lama di lembaga.

Pengasuhan berbasis lembaga, termasuk di LKSA, diposisikan sebagai alternatif terakhir dalam sistem pengasuhan anak.

Penempatan anak di lembaga idealnya bersifat sementara dan transisional, disertai upaya berkelanjutan untuk mencari solusi pengasuhan berbasis keluarga yang lebih stabil. Meskipun demikian, praktik di lapangan menunjukkan bahwa banyak anak tinggal di lembaga dalam jangka waktu yang panjang akibat keterbatasan sistem reunifikasi keluarga, minimnya alternatif pengasuhan keluarga pengganti, serta faktor sosial ekonomi keluarga asal (Lubis & Aulia, 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip kebijakan pengasuhan alternatif berkelanjutan dengan realitas implementasi yang dihadapi lembaga pengasuhan.

2. Prinsip Pengasuhan Alternatif Keberlanjutan

Pengasuhan alternatif berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan prinsip yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak anak serta menjaga keberlangsungan pengasuhan yang aman dan bermartabat. SNPA menegaskan bahwa prinsip utama pengasuhan alternatif adalah hak anak untuk memiliki keluarga, sehingga setiap anak pada dasarnya berhak diasuh oleh orang tua atau keluarganya sendiri, dan pemisahan anak dari keluarga hanya dapat dilakukan apabila terbukti demi kepentingan terbaik anak serta merupakan pilihan terakhir. Prinsip ini menempatkan pengasuhan alternatif bukan sebagai solusi utama, melainkan sebagai respon perlindungan

sementara ketika pengasuhan keluarga tidak dapat berjalan secara optimal.

Prinsip berikutnya berkaitan dengan tanggung jawab orang tua, keluarga, dan negara dalam penyelenggaraan pengasuhan anak. SNPA menekankan bahwa keluarga tetap memiliki tanggung jawab utama terhadap pengasuhan anak, sementara negara dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan ketika keluarga menghadapi keterbatasan dalam menjalankan fungsi pengasuhan (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2011). Prinsip ini menegaskan bahwa alasan ekonomi tidak dapat dijadikan dasar utama untuk memisahkan anak dari keluarga. Dukungan sosial dan layanan penguatan keluarga berperan signifikan dalam mencegah penempatan anak ke lembaga pengasuhan.

Prinsip kontinum pengasuhan menjadi dasar penting dalam pengasuhan alternatif berkelanjutan. Pengasuhan anak dipahami sebagai rangkaian yang berkesinambungan, mulai dari pengasuhan keluarga inti, keluarga besar, keluarga pengganti, hingga pengasuhan berbasis lembaga apabila diperlukan. SNPA menegaskan bahwa pengasuhan berbasis keluarga pengganti harus diprioritaskan dibandingkan pengasuhan berbasis lembaga, sesuai dengan kebutuhan dan situasi anak. Lubis & Aulia (2025) menunjukkan bahwa penempatan anak dalam lembaga tanpa mempertimbangkan kontinum pengasuhan berisiko memperpanjang

masa institusionalisasi dan menghambat kesiapan anak untuk kembali ke lingkungan keluarga atau masyarakat.

Prinsip partisipasi anak juga menjadi bagian penting dalam pengasuhan alternatif berkelanjutan. SNPA menekankan bahwa anak berhak didengar dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait pengasuhan sesuai dengan usia dan tingkat perkembangannya. Keterlibatan anak dalam proses pengasuhan berkontribusi terhadap rasa memiliki, keamanan emosional, dan penerimaan anak terhadap situasi pengasuhan yang dijalani. Menurut Kusumanita & Rachmawati (2023) Praktik pengasuhan yang tidak memberikan ruang partisipasi berisiko menempatkan anak sebagai objek keputusan, sehingga anak cenderung pasif dan kurang memiliki kontrol terhadap kehidupannya sendiri.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, pengasuhan alternatif berkelanjutan menuntut praktik pengasuhan yang berorientasi pada perlindungan hak anak, keberlanjutan pengasuhan, serta penghormatan terhadap martabat dan suara anak. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar normatif dalam menilai bagaimana pengasuhan alternatif dijalankan di LKSA, termasuk dalam penerapan aturan, disiplin, dan sanksi yang harus selaras dengan pendekatan pengasuhan non-kekerasan dan disiplin positif.

3. Kontinum Pengasuhan Anak (*Continuum of Care*)

Kontinum pengasuhan anak menggambarkan urutan pilihan pengasuhan yang harus dipertimbangkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan situasi anak. Pengasuhan oleh keluarga inti menjadi pilihan pertama yang harus diupayakan melalui berbagai bentuk intervensi penguatan keluarga, seperti bantuan sosial, konseling, dan pendampingan. Apabila pengasuhan keluarga inti tidak memungkinkan, pilihan berikutnya adalah pengasuhan oleh keluarga besar atau kerabat dekat yang masih berada dalam jaringan kekerabatan anak (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2011). Pendekatan ini bertujuan menjaga keberlanjutan identitas keluarga serta stabilitas relasi sosial anak.

Pengasuhan oleh keluarga pengganti, seperti orang tua asuh atau perwalian, menjadi tahap lanjutan apabila pengasuhan oleh keluarga inti maupun keluarga besar tidak dapat dilaksanakan. Bentuk pengasuhan ini tetap bersifat sementara dan memerlukan proses asesmen serta pengawasan yang ketat untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan anak. Pengangkatan anak ditempatkan sebagai solusi jangka panjang apabila reunifikasi dengan keluarga asal tidak memungkinkan dan anak membutuhkan kepastian pengasuhan yang permanen. Pengasuhan berbasis lembaga menjadi alternatif terakhir ketika seluruh pilihan pengasuhan berbasis keluarga tidak dapat dilaksanakan (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2011).

Meskipun kerangka kontinum pengasuhan telah dirumuskan secara sistematis, praktik di lapangan menunjukkan bahwa proses transisi antar tahap pengasuhan tidak selalu berjalan sebagaimana direncanakan. Keterbatasan sistem pendataan keluarga, minimnya calon keluarga pengganti, serta lemahnya mekanisme tindak lanjut menyebabkan banyak anak menetap di lembaga dalam jangka waktu yang panjang (Lubis & Aulia, 2025). Situasi ini menunjukkan bahwa pengasuhan berbasis lembaga tidak selalu berfungsi sebagai solusi sementara, tetapi dapat berubah menjadi bentuk pengasuhan jangka panjang yang memiliki risiko institusionalisasi terhadap perkembangan sosial dan emosional anak.

4. Perencanaan Pengasuhan dan Keberlanjutan

Perencana pengasuhan atau *permanency planning* merupakan komponen penting dalam memastikan keberlanjutan pengasuhan anak. SNPA menegaskan bahwa setiap anak yang ditempatkan dalam pengasuhan alternatif harus memiliki rencana pengasuhan individual yang disusun berdasarkan asesmen menyeluruh terhadap kondisi anak dan keluarganya (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2011). Asesmen berfungsi untuk mengidentifikasi kebutuhan dasar, kondisi psikososial, potensi risiko, serta peluang reunifikasi keluarga, sehingga keputusan pengasuhan tidak didasarkan pada pertimbangan administratif semata.

Rencana pengasuhan yang baik mencakup tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang, serta memuat langkah-langkah konkret yang akan dilakukan oleh lembaga bersama pihak terkait. Keterlibatan anak dalam penyusunan rencana pengasuhan menjadi penting agar anak memahami arah pengasuhan yang dijalani dan memiliki kesiapan psikologis terhadap perubahan situasi pengasuhan. Penelitian menunjukkan bahwa rencana pengasuhan yang jelas dan realistis berkontribusi terhadap stabilitas emosional anak serta meningkatkan kesiapan anak dalam menghadapi transisi pengasuhan (Kusumanita & Rachmawati, 2023). Pelaksanaan rencana pengasuhan membutuhkan koordinasi antara lembaga, keluarga, dan instansi terkait. Keterbatasan sumber daya serta beban administratif sering kali menyebabkan rencana pengasuhan tidak ditindaklanjuti secara optimal, sehingga anak tetap berada dalam pengasuhan lembaga tanpa kepastian transisi. Evaluasi berkala seharusnya menjadi mekanisme untuk menilai efektivitas pengasuhan serta menentukan langkah selanjutnya, namun praktik evaluasi sering kali terkendala oleh keterbatasan waktu dan kapasitas pendampingan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan pengasuhan tidak hanya bergantung pada komitmen lembaga, tetapi juga pada dukungan sistem perlindungan anak yang lebih luas.

5. Relevansi Pengasuhan Alternatif Berkelanjutan dengan Disiplin

Positif

Pengasuhan alternatif berkelanjutan menuntut pendekatan pengasuhan yang tidak hanya menjamin keteraturan perilaku anak, tetapi juga mendukung perkembangan psikososial dan kesiapan anak untuk hidup mandiri di masyarakat. SNPA menegaskan bahwa penerapan aturan, disiplin, dan sanksi harus dilakukan tanpa kekerasan serta disesuaikan dengan usia dan tingkat perkembangan anak (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2011). Ketentuan ini menunjukkan bahwa disiplin diposisikan sebagai sarana pendidikan, bukan sebagai alat kontrol yang bersifat represif.

Pendekatan disiplin positif memiliki keterkaitan erat dengan prinsip keberlanjutan pengasuhan karena menekankan pembentukan pengendalian diri, tanggung jawab, dan keterampilan sosial anak sebagai bekal transisi ke lingkungan keluarga atau masyarakat. Pola pendisiplinan yang hanya berorientasi pada kepatuhan jangka pendek berisiko menghasilkan perilaku yang tidak stabil ketika anak keluar dari lingkungan lembaga yang terkontrol. Sebaliknya, pendekatan yang menekankan pemahaman aturan dan refleksi perilaku lebih relevan untuk mendukung kesiapan anak menghadapi perubahan lingkungan sosial (Save the Children, 2019).

Meskipun demikian, penerapan disiplin positif di lembaga pengasuhan sering kali menghadapi tantangan struktural dan

kultural, seperti keterbatasan pelatihan pengasuh, rasio pengasuh dan anak yang tidak seimbang, serta kebiasaan pendisiplinan yang telah berlangsung lama. Situasi ini menyebabkan praktik yang dijalankan di lapangan sering kali hanya mencerminkan sebagian unsur disiplin positif tanpa penerapan konsep secara utuh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesesuaian antara prinsip pengasuhan alternatif berkelanjutan dan praktik disiplin positif tidak dapat diasumsikan secara otomatis, melainkan perlu dianalisis melalui temuan empiris di masing-masing lembaga pengasuhan.

D. Konsep Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

1. Pengertian LKSA

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan institusi yang menyelenggarakan pelayanan sosial bagi anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif karena keluarga tidak dapat menjalankan fungsi pengasuhan secara layak dan aman. Regulasi nasional menegaskan bahwa LKSA berfungsi sebagai bagian dari sistem perlindungan anak yang bertugas memberikan pengasuhan sementara, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pembinaan sosial bagi anak (Kementerian Sosial RI, 2011). Kedudukan ini menempatkan LKSA bukan sebagai pengganti permanen keluarga, melainkan sebagai bentuk intervensi sementara yang tetap harus diarahkan pada solusi pengasuhan berbasis keluarga atau bentuk pengasuhan permanen lainnya.

Peran LKSA tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak anak atas perlindungan dan kesejahteraan. Sistem perlindungan anak memposisikan lembaga sebagai pelaksana teknis pelayanan sosial yang harus bekerja sesuai dengan standar nasional, prinsip kepentingan terbaik anak, serta pendekatan non-kekerasan. Kerangka ini menunjukkan bahwa keberadaan LKSA tidak hanya diukur dari kemampuan menyediakan tempat tinggal, tetapi juga dari kualitas pengasuhan dan relasi sosial yang dibangun antara pengasuh dan anak. Oleh sebab itu, kualitas layanan LKSA sangat ditentukan oleh kapasitas institusi dalam menerjemahkan prinsip perlindungan anak ke dalam praktik keseharian.

Meskipun secara normatif LKSA memiliki mandat yang jelas, praktik penyelenggaraan layanan sering kali dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, variasi kapasitas pengelola, serta perbedaan latar belakang pengasuh. Kondisi ini menyebabkan kualitas layanan antar LKSA dapat berbeda secara signifikan, meskipun berada dalam kerangka regulasi yang sama. Situasi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan standar nasional belum tentu menjamin keseragaman kualitas praktik pengasuhan di tingkat lembaga.

2. Fungsi dan Tanggung Jawab LKSA

Fungsi utama LKSA mencakup penyediaan pengasuhan, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dari kekerasan dan penelantaran, serta pembinaan sosial dan pendidikan anak. Standar Nasional Pengasuhan Anak menegaskan bahwa lembaga wajib menciptakan lingkungan yang aman, mendukung perkembangan psikososial, serta menjunjung tinggi martabat dan hak anak (Kementerian Sosial RI, 2011). Tanggung jawab ini menuntut lembaga untuk tidak hanya fokus pada aspek pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga pada kualitas relasi emosional dan sosial yang dialami anak selama berada dalam pengasuhan.

Pembinaan perilaku dan karakter anak menjadi bagian integral dari fungsi pengasuhan di LKSA. Proses ini dilakukan melalui penerapan aturan, pembiasaan, serta bimbingan perilaku yang bertujuan membantu anak memahami norma sosial dan mengembangkan tanggung jawab. Cara lembaga dan pengasuh menerapkan disiplin akan sangat memengaruhi persepsi anak terhadap otoritas, keadilan, serta rasa aman. Oleh karena itu, pendekatan disiplin yang digunakan tidak dapat dilepaskan dari mandat perlindungan anak yang menolak segala bentuk kekerasan fisik maupun psikologis.

Tanggung jawab LKSA juga mencakup persiapan anak untuk kembali ke keluarga atau masyarakat melalui pembekalan keterampilan hidup, pendidikan, dan penguatan kepercayaan diri.

Fungsi ini berkaitan erat dengan konsep keberlanjutan pengasuhan, karena anak perlu dipersiapkan secara bertahap untuk menghadapi transisi pengasuhan. Apabila fungsi ini tidak berjalan optimal, anak berisiko mengalami kesulitan adaptasi setelah keluar dari lembaga, yang dapat berdampak pada keberfungsian sosialnya di kemudian hari (Aulia Akbar & Taufik, 2022).

3. Peran Pengasuh dalam LKSA

Pengasuh memiliki peran sentral dalam pelaksanaan pengasuhan di LKSA. Dalam praktik sehari-hari, pengasuh berfungsi sebagai figur pengganti orang tua yang memberikan perhatian, bimbingan, serta dukungan emosional kepada anak. Peran pengasuh tidak hanya terbatas pada pengawasan perilaku anak, tetapi juga mencakup pembentukan karakter, nilai moral, dan keterampilan sosial anak melalui interaksi yang bersifat edukatif dan relasional.

Astutik et al. (2021) menegaskan bahwa kualitas pengasuhan di LKSA sangat dipengaruhi oleh kompetensi dan pengelolaan sumber daya manusia, karena pengasuh menjadi aktor utama yang menjalankan pelayanan sosial anak di lembaga. Temuan ini sejalan dengan penelitian Prasetyo et al. (2023) yang menyatakan bahwa pengasuh yang memiliki pemahaman tentang perkembangan anak dan pendekatan pengasuhan non-kekerasan cenderung mampu menciptakan lingkungan pengasuhan yang lebih aman dan suportif.

4. Implikasi Kelembagaan terhadap Praktik Disiplin Positif di

LKSA

Karakteristik kelembagaan LKSA memiliki implikasi langsung terhadap cara disiplin diterapkan kepada anak. Keterbatasan jumlah pengasuh dan tingginya tuntutan pengelolaan aktivitas harian sering kali mendorong lembaga untuk mengutamakan keteraturan dan kepatuhan sebagai prioritas utama. Fokus pada keteraturan kolektif dapat membuat pendekatan disiplin lebih bersifat instruktif dan kurang memberikan ruang bagi dialog individual dengan anak. Situasi ini berpotensi membatasi penerapan pendekatan disiplin yang menekankan refleksi perilaku dan pembelajaran jangka panjang.

Budaya organisasi lembaga juga membentuk pola relasi antara pengasuh dan anak. Lembaga yang menekankan hierarki dan kepatuhan cenderung mereproduksi relasi kuasa yang kuat, sehingga suara anak kurang mendapat ruang dalam pengambilan keputusan terkait aturan dan konsekuensi. Sebaliknya, budaya lembaga yang mendorong komunikasi terbuka dan refleksi bersama lebih memungkinkan penerapan pendekatan pengasuhan yang partisipatif dan dialogis (UNICEF, 2025). Perbedaan budaya ini menunjukkan bahwa praktik disiplin tidak hanya ditentukan oleh individu pengasuh, tetapi juga oleh nilai dan norma yang berkembang di tingkat institusi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan disiplin positif di LKSA tidak dapat dilepaskan dari konteks kelembagaan yang mbingkai praktik pengasuhan sehari-hari. Praktik yang menyerupai disiplin positif dapat muncul sebagai hasil adaptasi pengasuh terhadap situasi tertentu, namun tanpa dukungan sistem kelembagaan yang memadai, penerapan konsep secara utuh menjadi sulit dicapai. Oleh karena itu, analisis terhadap praktik disiplin di LKSA perlu mempertimbangkan keterbatasan struktural dan kultural lembaga, bukan hanya menilai perilaku pengasuh secara individual.

E. Konsep Disiplin Positif

1. Pengertian Disiplin Positif

Disiplin positif dipahami sebagai pendekatan pengasuhan yang membentuk perilaku anak melalui proses pembelajaran yang menghormati martabat anak serta bebas dari kekerasan fisik dan psikologi. Disiplin positif tidak sekadar dipahami sebagai teknik pendisiplinan, tetapi sebagai paradigma pengasuhan yang memandang perilaku anak sebagai bagian dari proses belajar (Save the Children, 2019). Pemahaman ini menggeser posisi anak dari objek pengendalian menjadi subjek pembelajaran.

Fokus disiplin positif diarahkan pada dialog, refleksi, serta kesempatan bagi anak untuk memperbaiki kesalahan, sehingga proses pendisiplinan menjadi bagian dari pembelajaran moral dan

sosial. Tujuan utama pendekatan ini bukan menghasilkan kepatuhan instan, tetapi membangun kontrol diri internal agar anak mampu mengambil keputusan secara bertanggung jawab ketika tidak berada di bawah pengawasan langsung. Perspektif ini sejalan dengan pendekatan perlindungan anak yang menekankan pembentukan kapasitas psikososial melalui relasi pengasuhan yang aman dan stabil (Gallitto, 2021).

Disiplin positif juga dipahami sebagai proses jangka panjang yang membutuhkan konsistensi serta keterlibatan emosional pengasuh. Perubahan perilaku anak terjadi melalui interaksi yang berulang dan stabil, sehingga kualitas relasi antara pengasuh dan anak menjadi faktor penting dalam efektivitas pendekatan ini (UNICEF, 2025).

2. Tujuan Disiplin Positif

Tujuan utama disiplin positif adalah membentuk perilaku dan karakter anak secara berkelanjutan melalui proses pembelajaran yang bermakna. Save the Children menekankan bahwa disiplin positif berorientasi pada tujuan jangka panjang, bukan sekadar mengendalikan perilaku anak secara instan atau situasional (Save the Children, 2019). Orientasi ini menempatkan anak sebagai pembelajar aktif dalam proses pengasuhan.

Tujuan jangka panjang disiplin positif mencakup pengembangan pengendalian diri, rasa tanggung jawab, serta

kemampuan anak untuk memahami konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan. Anak tidak hanya diarahkan untuk menaati aturan, tetapi juga diajak memahami nilai moral dan sosial yang mendasari aturan tersebut. Proses ini membantu anak membangun motivasi intrinsik untuk berperilaku positif, bukan kepatuhan yang bergantung pada pengawasan eksternal.

Pengasuhan berbasis lembaga memiliki kepentingan strategis dalam penerapan disiplin positif, terutama dalam mempersiapkan anak menghadapi kehidupan sosial di luar lembaga. Disiplin positif membantu anak mengembangkan keterampilan sosial, kemampuan mengelola emosi, serta sikap bertanggung jawab yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa anak yang dibesarkan dengan pendekatan disiplin non-kekerasan menunjukkan tingkat adaptasi sosial yang lebih baik ketika memasuki lingkungan baru (Gallitto, 2021).

3. Prinsip Disiplin Positif

Pengasuhan tanpa kekerasan merupakan prinsip utama dalam disiplin positif. Save the Children menegaskan bahwa kekerasan fisik maupun verbal tidak dapat dibenarkan dalam praktik pengasuhan karena bertentangan dengan hak anak dan berdampak negatif terhadap perkembangan emosional dan sosial anak (Save the Children, 2019). Prinsip ini menempatkan disiplin sebagai proses pembelajaran, bukan sebagai sarana penghukuman.

a. Orientasi Tujuan Jangka Panjang

Pilar ini menegaskan bahwa respon pendisiplinan perlu dikaitkan dengan nilai yang ingin dibangun. Save the Children menekankan bahwa pertanyaan utama pengasuh bukan “bagaimana menghentikan perilaku ini”, tetapi “nilai apa yang ingin ditanamkan melalui situasi ini” (Durrant, 2010). Jadi menunjukkan bahwa disiplin positif menuntut refleksi pengasuh terhadap tujuan pengasuhan.

b. Kehangatan dan Keamanan Emosional

Kehangatan menjadi prasyarat pembelajaran perilaku. Save the Children menjelaskan bahwa anak hanya dapat belajar secara optimal ketika merasa aman secara emosional (Save the Children, 2019). Kehangatan bukan sikap memanjakan, melainkan kondisi relasional yang memungkinkan anak menerima koreksi tanpa merasa terancam. Pilar ini menjelaskan mengapa pendekatan keras sering gagal membentuk perilaku jangka panjang.

c. Struktur dan Konsistensi

Struktur berfungsi sebagai panduan perilaku. Durrant menegaskan bahwa disiplin positif tetap membutuhkan aturan yang jelas dan konsisten agar anak memahami batasan (Durrant, 2010). Tanpa struktur, kehangatan berisiko berubah menjadi permisivitas. Estiningsih et al. (2023) menunjukkan bahwa konsistensi aturan membantu anak merasa aman dan mengurangi konflik perilaku,

terutama pada lingkungan pengasuhan dengan lebih dari satu pengasuh.

d. Pemecahan Masalah dan Partisipasi Anak

Pilar ini menempatkan keterlibatan anak dalam memahami perilaku dan mencari solusi bersama pengasuh (Durrant, 2019). Pendekatan ini membantu anak mengembangkan kemampuan refleksi dan tanggung jawab, menunjukkan bahwa disiplin positif juga merupakan sarana pembelajaran demokratis dalam relasi pengasuhan.

4. Bentuk Disiplin Positif di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Bentuk disiplin positif di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) pada penelitian ini dipahami sebagai wujud praktik pendisiplinan yang diturunkan dari prinsip dan pilar disiplin positif menurut Save the Children. Pengasuhan di LKSA memiliki karakteristik khusus, seperti relasi pengasuh dengan anak yang bersifat profesional dan latar belakang anak yang beragam, sehingga disiplin positif perlu diwujudkan melalui praktik yang adaptif dan kontekstual.

a. Penetapan Aturan Bersama Anak Asuh

Penetapan aturan bersama anak asuh merupakan bentuk awal disiplin positif yang mencerminkan prinsip partisipasi anak dan tujuan jangka panjang pengasuhan. Save the Children menekankan bahwa anak lebih mudah mematuhi aturan ketika memahami alasan

dan tujuan aturan tersebut (Durrant, 2019). Keterlibatan anak dalam penyusunan aturan membantu anak merasa dihargai sebagai subjek pengasuhan, bukan sekadar penerima perintah.

Pada konteks LKSA, penetapan aturan bersama dapat diwujudkan melalui diskusi kelompok mengenai tata tertib harian, jadwal kegiatan, atau aturan hidup bersama. Proses ini bukan hanya bertujuan menghasilkan aturan tertulis, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran sosial bagi anak untuk memahami tanggung jawab dan konsekuensi hidup bersama. Bentuk ini menunjukkan bahwa disiplin positif tidak dimulai saat terjadi pelanggaran, melainkan sejak awal melalui kesepakatan yang disadari.

b. Penerapan Konsekuensi Logis Non-Kekerasan

Konsekuensi logis merupakan bentuk disiplin positif yang berfungsi sebagai sarana pembelajaran sebab-akibat. Save the Children menjelaskan bahwa konsekuensi logis membantu anak memahami dampak perilaku secara rasional tanpa merendahkan martabat anak (Save the Children, 2019). Konsekuensi ini berbeda dari hukuman karena memiliki keterkaitan langsung dengan perilaku yang dilakukan.

Pada pengasuhan di LKSA, konsekuensi logis dapat berupa tanggung jawab tambahan, pengembalian kondisi yang terganggu akibat perilaku anak, atau pembatasan sementara terhadap aktivitas tertentu yang relevan dengan perilaku yang muncul. Bentuk ini

bertujuan membantu anak merefleksikan tindakan dan memperbaiki kesalahan, bukan menimbulkan rasa takut. Pendekatan ini penting karena banyak anak asuh memiliki pengalaman disiplin keras sebelumnya, sehingga membutuhkan pola pendisiplinan yang aman secara emosional.

c. Teguran Dialogis dan Refleksi Perilaku

Teguran dialogis merupakan bentuk disiplin positif yang menekankan komunikasi dua arah antara pengasuh dan anak. Save the Children mendorong pengasuh untuk merespons perilaku anak melalui dialog yang membantu anak memahami apa yang terjadi, alasan perilaku tersebut, serta dampaknya terhadap diri sendiri dan orang lain (Durrant, 2019).

Pada konteks LKSA, teguran dialogis dapat dilakukan melalui percakapan personal setelah terjadi perilaku yang tidak sesuai aturan. Pengasuh mengajak anak merefleksikan peristiwa tanpa menggunakan nada mengancam atau merendahkan. Proses refleksi ini membantu anak mengembangkan kesadaran diri dan kemampuan mengelola emosi. Bentuk ini menunjukkan bahwa disiplin positif berfungsi sebagai proses pembelajaran moral, bukan sekadar koreksi perilaku.

d. Keteladanan Pengasuh dalam Perilaku Sehari-hari

Keteladanan pengasuh merupakan bentuk disiplin positif yang bersifat implisit tetapi sangat berpengaruh. Save the Children

menegaskan bahwa anak belajar perilaku lebih efektif melalui observasi terhadap sikap dan respons orang dewasa dibandingkan instruksi verbal semata (Durrant, 2019). Sikap pengasuh saat menghadapi konflik, mengelola emosi, dan mematuhi aturan menjadi model perilaku bagi anak.

Pada lingkungan LKSA, pengasuh berperan sebagai figur otoritas sekaligus pendamping. Keteladanan pengasuh dalam bersikap adil, konsisten, dan menghormati anak memperkuat internalisasi nilai disiplin positif. Bentuk ini penting karena anak asuh sering kali meniru pola relasi yang mereka lihat secara langsung dalam kehidupan sehari-hari di lembaga.

e. Penguatan Positif terhadap Perilaku Anak

Penguatan positif merupakan bentuk disiplin positif yang bertujuan memperkuat perilaku adaptif anak. Save the Children menjelaskan bahwa apresiasi terhadap perilaku positif membantu anak menginternalisasi nilai dan meningkatkan motivasi intrinsik (Save the Children, 2019). Penguatan tidak selalu berbentuk materi, tetapi dapat berupa pujian, pengakuan, atau kepercayaan tambahan.

Pada pengasuhan di LKSA, penguatan positif dapat diberikan ketika anak menunjukkan tanggung jawab, kepedulian terhadap teman, atau kemampuan mengelola emosi. Bentuk ini membantu anak membangun rasa percaya diri dan memperkuat perilaku yang sesuai dengan nilai pengasuhan lembaga. Penguatan positif juga

berfungsi menyeimbangkan proses pendisiplinan agar tidak hanya berfokus pada koreksi kesalahan.

f. Pendampingan Perilaku secara Berkelanjutan

Pendampingan perilaku merupakan bentuk disiplin positif yang menekankan keberlanjutan proses pengasuhan. Save the Children menekankan bahwa perubahan perilaku anak membutuhkan waktu, konsistensi, dan relasi yang stabil (Durrant, 2019). Pendampingan tidak berhenti setelah perilaku dikoreksi, tetapi dilanjutkan melalui pemantauan dan dukungan.

Pada konteks LKSA, pendampingan perilaku dilakukan melalui keterlibatan pengasuh dalam aktivitas harian anak, pemantauan perkembangan perilaku, serta pemberian umpan balik secara berkala. Bentuk ini menunjukkan bahwa disiplin positif tidak bersifat reaktif, melainkan proses jangka panjang yang terintegrasi dengan pengasuhan sehari-hari.